



Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu

Alycia Rika Fangidae^{1*}, Anthon Simon Y. Kerihi², Herly M. Oematan³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: netjilefalena4@gmail.com*

Abstract. *This research aims to determine the quality of financial reports at the Belu Regency Ministry of Religion office. This research uses a qualitative descriptive method. The data sources used in this research are primary data and secondary data. The research informants were the heads of the Belu Regency Ministry of Religion, planning and finance departments. The research was carried out in four stages, namely: data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. based on research results regarding the quality of relevant financial reports, it is in accordance with Government Regulation No. 71 of 2010 which is the reference for determining quality financial reports. The results of research regarding the quality of reliable financial reports can be concluded that at the Belu Regency Ministry of Religion office it is not difficult to prepare financial reports because they are free from misleading meanings. The results of research regarding the quality of comparable financial reports can be concluded that the financial reports at the Belu Regency Ministry of Religion office provide information that can be compared with the previous period. The results of research regarding the quality of financial reports that can be understood can be concluded that financial reports are certainly not difficult for users to understand and will not hinder the decision-making process, for this reason the information in financial reports must be able to be understood by users, thereby making financial reports understandable because they can help the process. decision-making.*

Keywords: *Comparable, Financial report quality, Relevant, Reliable, Understandable.*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas laporan keuangan pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Informan penelitian adalah kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu, bagian perencanaan, dan bagian keuangan. Penelitian dilakukan dalam empat tahap yakni: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. berdasarkan hasil penelitian terkait kualitas laporan keuangan yang relevan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 yang menjadi acuan penentuan laporan keuangan yang berkualitas. Hasil penelitian terkait kualitas laporan keuangan yang andal dapat disimpulkan bahwa pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu tidaklah sulit ketika menyusun laporan keuangan karena bebas dari pengertian yang menyesatkan. Hasil penelitian mengenai kualitas laporan keuangan yang dapat dibandingkan dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu memberikan informasi yang dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hasil penelitian mengenai kualitas laporan keuangan yang dapat dipahami dapat disimpulkan bahwa pastinya laporan keuangan tidak sulit dimengerti pengguna dan tidak akan menghambat proses pengambilan keputusan, untuk itu informasi dalam laporan keuangan harus bisa dipahami oleh penggunaanya, dengan demikian membuat laporan keuangan bisa dipahami karena dapat membantu proses pengambilan keputusan.

Kata Kunci: Sebanding, Kualitas laporan keuangan, Relevan, Dapat diandalkan, Dapat dipahami.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan akuntansi pemerintahan tidaklah secepat akuntansi bisnis, penyebabnya adalah karakteristiknya tidak banyak mengalami perubahan. Dengan adanya tuntutan masyarakat menyebabkan akuntansi pemerintahan menjadi penting. Semakin besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah semakin besar pula tuntutan akuntabilitas keuangan sebagai wujud transparansi keuangan dalam pemerintahan. Akuntansi pemerintahan dapat

didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintahan berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisiran, suatu transaksi keuangan pemerintahan serta penafsiran atas informasi keuangan (Nuramalia, 2017:1).

Kualitas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna untuk pengambilan keputusan ekonomi dan bisnis (Sukamulja, 2019:24). Laporan keuangan pemerintahan merupakan suatu hal menarik untuk dikaji, mengingat semakin menguatnya tuntutan atas akuntabilitas lembaga-lembaga pemerintahan baik itu di sektor pemerintahan daerah yang menunjukkan bahwa meningkatnya perkembangan sektor publik di Indonesia. Upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah adalah dengan menyusun dan mewajibkan laporan keuangan.

Laporan keuangan yang dihasilkan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Basis Cash Toward Accrual (CTA). Laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu tidak mampu menghasilkan informasi seperti yang diharapkan dikarenakan laporan keuangan tidak menggambarkan pengeluaran sesungguhnya. Dimana pengeluaran yang dicatat hanya belanja pada laporan realisasi anggaran sedangkan dalam SAP harus dimasukkan aset, utang, dan ekuitas.

Perlakuan pencatatan yang didasari oleh teknik akrual harus dilakukan secara konsisten terhadap akun-akun perkiraan yang terdapat dalam laporan posisi keuangan. Dari segi transparansi dan akuntabilitas, akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel apabila dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Hal itu disebabkan karena dalam akuntansi berbasis akrual seluruh beban yang terjadi baik yang sudah dibayar maupun belum dibayar dicatat atau diakui. Dengan demikian akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan perhitungan biaya yang lebih wajar. Pada sisi lain, akuntansi berbasis akrual juga dapat menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik. Hal itu disebabkan karena akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan informasi tentang penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya serta menyajikan pengungkapan kewajiban dimasa yang akan datang.

Kantor Kementerian Agama merupakan Kantor Kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan agama. Kantor Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara. Kantor Kementerian Agama kabupaten Belu terletak

pada perbatasan antara Indonesia dan timor leste sehingga untuk melihat mekanisme pada suatu laporan keuangan maka diperlukan kualitas laporan keuangan yang baik.

Berdasarkan data laporan keuangan anggaran dan realisasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu, anggaran pada tahun 2019-2022 mengalami fluktuasi pada periode yang sama, dengan adanya perubahan naik turunnya kinerja keuangan. Ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan anggaran belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan adanya beberapa program dan kegiatan yang belum sepenuhnya terlaksana. Terlihat bahwa pada tahun 2022 anggarannya sebesar Rp 23,772,698,385 dengan realisasinya sebesar Rp 23,937,661,000 dan presentase 99,10. Hal ini memungkinkan terjadinya penurunan. Hal ini di dukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang sudah meneliti topik permasalahan tersebut seperti yang dilakukan oleh Chairina, Tineke (2019) tentang Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BPKAD kota Surabaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, artinya pemanfaat sistem informasi akuntansi membantu BPKAD dalam penyediaan informasi keuangan yang berkualitas. Jurmaida (2019) Analisis Dampak Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Terhadap Kualitas laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual memiliki dampak penyajian laporan keuangan BPKAD.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode studi kasus yang didukung pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini berfokus pada kualitas laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Peneliti akan melakukan wawancara kepada pegawai pada kantor agama Kabupaten Belu yang berkaitan dengan Kualitas Laporan Keuangan. Informan yang dipilih peneliti dalam upaya memperoleh bahan dan data-data penelitian adalah Kepala kantor, pegawai bagian perencanaan dan pegawai bagian keuangan. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan menggunakan beberapa metode, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah pengumpulan data maka akan dianalisis menggunakan teknik analisis data yang dijelaskan Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu laporan keuangan dapat dinilai berkualitas apabila laporan keuangan tersebut sudah memenuhi peraturan yang berlaku. Salah satu peraturan yang harus ditaati adalah peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintah. Pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu sudah menggunakan peraturan pemerintah No.71 tahun 2010 sebagai salah satu landasan untuk menyusun laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 yang diperlukan pemerintah daerah agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Adapun keempat karakteristik tersebut adalah Relevan, Andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kualitas laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu sudah menerapkan kualitas laporan keuangan yang baik karena sudah memenuhi kebutuhan para pemakainya dalam mengambil keputusan.

a. Relevan

Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 menyebutkan bahwa laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang terdapat pada laporan keuangan bisa mempengaruhi keputusan pengguna dan membantu mereka mengevaluasi masa lalu atau masa kini.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kualitas laporan keuangan yang Relevan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menjadi acuan penentuan laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil wawancara peneliti mengenai Kualitas Laporan Keuangan yang Relevan dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menjadi acuan penentuan laporan keuangan yang berkualitas. Dikarenakan laporan keuangan pada kantor kementerian Agama Kabupaten Belu sudah memenuhi penyusunan komponen-komponen laporan keuangan yaitu neraca, realisasi anggaran, laporan operasional, dan laporan perubahan equitas. Dari hasil tersebut hubungan antara kualitas laporan keuangan yang relevan dengan teori *stewardship* yang menjelaskan bahwa pemerintah bertindak sebagai manajer mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan dalam membuat keputusan.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta diverifikasi. Informasi yang mungkin relevan, tetapi jika hakikatnya atau penyajian tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa laporan keuangan yang andal pada kantor Kementrian Agama Kabupaten Belu tidak sulit Ketika Menyusun laporan keuangan karena bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penakainya sebagai penyajian setiap fakta dengan jujur, dan dapat dibandingkan serta diverifikasi.

Dari hasil wawancara peneliti mengenai kualitas laporan keuangan yang andal dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pada kantor Kementrian Agama Kabupaten Belu tidak sulit ketika menyusun laporan keuangan karena bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian setiap fakta dengan jujur, dan dapat dibandingkan, serta diverifikasi. Hubungan antaran kualitas laporan keuangan yang andal dengan teori *stewardship* yaitu penyajian kualitas laporan pada Kementrian Agama Kabupaten Belu mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang dapat diuji kebenarannya, sehingga terbentuknya laporan keuangan yang berkualitas.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan apabila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kualitas laporan keuangan yang dapat dibandingkan pada kantor Kementrian Agama Kabupaten Belu memberikan informasi akuntansi yang dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu harus menggunakan prinsip akuntansi yang sama karena dapat dibandingkan antara satu laporan keuangan dengan laporan keuangan sebelumnya.

Dari hasil wawancara peneliti mengenai kualitas laporan keuangan yang dapat dibandingkan dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pada kantor Kementrian Agama Kabupaten Belu memberikan informasi akuntansi yang dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu harus menggunakan prinsip akuntansi yang sama karena dapat dibandingkan antara satu laporan keuangan dengan laporan keuangan sebelumnya. Hubungan antaran kualitas laporan keuangan yang dapat dibandingkan dengan teori *stewardship* yaitu laporan keuangan yang disajikan pada Kementrian Agama Kabupaten Belu harus sesuai dari waktu ke waktu, sehingga laporan keuangan tersebut tidak menimbulkan manipulasi.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Informasi yang disajikan jelas tidak mengandung arti yang menyesatkan dan menggunakan istilah yang mudah dipahami.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kualitas laporan keuangan yang dapat dipahami pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu pastinya laporan keuangan tidak sulit dimengerti pengguna dan tidak akan menghambat proses pengambilan Keputusan untuk itu, semua informasi dalam laporan keuangan harus bisa dipahami oleh penggunanya, dengan demikian membuat laporan keuangan bisa dipahami karena dapat membantu proses pengambilan Keputusan.

Dari hasil wawancara peneliti mengenai kualitas Laporan Keuangan yang Dapat dipahami dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu dapat dipahami, pastinya laporan keuangan tidak sulit dimengerti pengguna dan tidak akan menghambat proses pengambilan keputusan untuk itu, semua informasi dalam laporan keuangan harus bisa dipahami oleh penggunanya, dengan demikian membuat laporan keuangan bisa dipahami karena dapat membantu proses pengambilan keputusan. Hubungan antara kualitas laporan keuangan yang dapat dibandingkan dengan teori *stewardship* yaitu laporan keuangan pada Kementerian Agama Kabupaten Belu yang dibuat dapat diserapi dengan baik dibuktikan dengan adanya laporan neraca, catatan atas laporan keuangan, dan realisasi yang disusun dapat dengan mudah dipahami.

Pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu setelah diwawancara, berdasarkan hasil penelitian dengan bagian keuangan mengenai kualitas laporan keuangan dikatakan sudah berkualitas karena memiliki laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu juga sudah menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), dan laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL). Laporan finansial terdiri dari neraca, laporan operasional (LO), dan laporan perubahan ekuitas (LPE). Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat mengemukakan bahwa kualitas laporan keuangan pada kantor Kementerian Agama kabupaten Belu kurang baik.

Menurut (Rachmawati & Anik, 2020) dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan daerah, ada hubungan positif antara kualitas laporan keuangan daerah dengan teori Stewardship Pemerintah yang bertindak sebagai manajer mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Pemerintah dituntut memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, dengan demikian teori Stewardship menyajikan informasi yang kurang baik terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Belu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dwiyanti, 2019) yang menyatakan bahwa Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Belu sama-sama tergolong dalam kriteria kurang baik.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kualitas laporan keuangan pada kantor Kementrian Agama Kabupaten Belu dapat disimpulkan bahwa Dalam hal ketaatan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan Kantor Agama Kabupaten Belu telah memenuhi sebagian besar kriteria yang ditetapkan. Proses pencatatan transaksi keuangan dilakukan secara sistematis dan didukung oleh dokumen pendukung yang memadai. peneliti menemukan bahwa laporan keuangan telah dipublikasikan secara rutin. Hal ini berarti laporan keuangan sudah dilakukan secara konsisten serta telah disajikan tepat waktu sesuai periode akuntansi yaitu bulanan, triwulan, dan tahunan. Kualitas laporan keuangan pada kantor Kementrian Agama Kabupaten Belu Sudah menerapkan sistem akuntansi pemerintah (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 yang menjadi acuan penentuan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas dapat dengan mudah dipahami.

Saran

Penelitian ini memberikan harapan bagi dua pihak. Bagi objek penelitian yaitu, Kantor Kementrian Agama Kabupaten Belu diharapkan mampu menerapkan lagi laporan keuangan berupa laporan arus kas, laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL), dan catatan atas laporan keuangan dalam menyusun laporan keuangan terstruktur dan berkualitas. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sejenis dan lebih lanjut dalam bidang yang sama.

DAFTAR REFERENSI

- Chairina, F., & Wehartaty, T. (2019). Pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kota Surabaya. *Jurnal Akuntatika*, 11(1), 31-39.
- Donaldson, L., & Davis, J. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australia Journal of Management*, 16, 49-64.
- Dwitayanti, Y. (2019). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Banyuasin. *Akuntanika*, 5(1), 1-11.
- Fahmi, I. (2012). *Analisis kinerja keuangan*. Alfabeta.
- Haliah. (2013). Kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah dan faktor yang mempengaruhinya. Disertasi, Universitas Hasanudin, Makasar.
- Hanafi, M. M., & Halim, A. (2016). *Analisis laporan keuangan* (Edisi Kelima). UPP STIM YKPN.
- Hery. (2016). *Analisis laporan keuangan*. Bumi Aksara.
- Jurmaida. (2019). Analisis dampak penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap pelaporan keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 2(1), 32-51.
- Kieso, D., Weygandt, J., & Warfield, T. (2014). *Intermediate accounting: IFRS edition*. John Wiley & Sons.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Analisis data kualitatif* (Tjetjep Rohendi Rohidi, Trans.). Universitas Indonesia.
- Nordiawan, D. (2010). *Akuntansi sektor publik*. Salemba Empat.
- Nuramalia. (2017). *Akuntansi pemerintahan*. IN MEDIA.
- Rachmawati, D. D., & Anik, S. (2020). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah, good governance, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi*.
- Rosana, L., & Bharata, R. W. (2023). Implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas penyajian laporan keuangan. *Jurnalku*, 3(1), 23-34.
- Saputra, B. W. (2015). Pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal JOM FEEKON*, 2.
- Septian. (2021). Implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(2), 85-98.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. PT Alfabeta.
- Sukamulja, S., & Sukmawati, S. (2019). *Analisis laporan keuangan*. ANDI.